

RESEARCH ARTICLE

IMPLEMENTASI MEDIA MASSA DALAM KRISIS KEDAULATAN RAKYAT

Aulia Hasanatu Fial^{1✉}, Ratnasari Nur Anggraini², Rahayu Subekti²

¹ International Law Development Department, International Law Student Association Chapter Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

² Advocacy and Student Welfare Department, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ Aulia.fial@student.uns.ac.id

ABSTRACT

People's sovereignty is something absolute in a democracy. This power gives the people the opportunity to participate directly or indirectly in the government a state. It should be noted that there are various ways in which the people can exercise their sovereignty, such as through political representatives who are elected once every 5 years or by voicing their orders directly through various actions and the media. One of them is the mass media. The use of mass media in Indonesia has been intensively carried out since the Soeharto presidency, marked by the presence of the minister of information and a special department that handles mass media coverage. From this, it is clear that there is an understanding of how powerful the mass media is and the impact it has on people's sovereignty, public opinion, and the sustainability of a government. . On the one hand, awareness of the use of mass media and freedom of expression is a positive and effective thing to do. But what if the facility is actually a boomerang for the people's sovereignty itself? What if public opinion is actually planned to fit the country's political agenda? By using qualitative research methods, this research article will discuss what is possible and has happened from the relationship between the mass media and people's sovereignty in a democratic state. This research is also expected to make the public aware of the importance of literacy and education in dealing with mass media coverage, Not just any false news and simply deceived by news and propaganda techniques.

Keywords: *Democracy, People's Sovereignty, Mass Media.*

Kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang absolut dalam negara demokrasi. Kekuasaan ini memberikan rakyat kesempatan dalam ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pemerintahan negara. Perlu diketahui ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya, seperti melalui perwakilan politik yang dipilihnya setiap 5 tahun sekali ataupun menyuarakan langsung pemerintahnya melalui berbagai macam aksi dan media. Salah satunya adalah media massa. Pemanfaatan media massa di Negara Indonesia mulai gencar dilakukan sejak masa kepresidenan Soeharto, ditandai dengan hadirnya menteri penerangan dan departemen khusus yang menangani pemberitaan

media massa. Dari sini sebenarnya sudah terlihat dengan jelas bahwa pemahaman tentang seberapa kuatnya media massa dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kedaulatan rakyat, opini publik, serta keberlangsungan suatu pemerintahan. . Dalam satu sisi kesadaran akan penggunaan media massa dan kebebasan berpendapat ini merupakan hal yang positif dan efektif dilakukan. Namun bagaimana jika sebetulnya fasilitas tersebut adalah bumerang bagi kedaulatan rakyat itu sendiri? Bagaimana jika sebetulnya opini publik sudah direncanakan agar sesuai dengan agenda politik negara? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, artikel penelitian kali ini akan membahas mengenai apa saja yang mungkin dan telah terjadi dari hubungan media massa dan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyadarkan khalayak akan pentingnya literasi dan edukasi dalam menghadapi pemberitaan media massa. Tidak sembarang termakan berita *hoax* dan semata-mata tertipu dengan teknik pemberitaan dan propaganda.

Kata Kunci: Demokrasi, kedaulatan rakyat, media masa.

INTRODUCTION

Media massa merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi dari komunikator kepada masyarakat luas. Alat yang digunakan dalam penyampaian pesan sendiri dapat berupa surat kabar, radio, dan televisi¹. Dalam hal ini kemajuan teknologi menjadi salah satu pendukung media massa untuk menyampaikan berbagai informasi ke khalayak. Kebebasan media massa dalam menyampaikan informasi di era globalisasi ini juga serta merta membuka pintu menuju dua kenyataan yang tak terelakkan.

Pertama adalah akses informasi yang semakin mudah oleh masyarakat sehingga apapun yang sedang terjadi dalam kursi pemerintahan akan cepat tersampaikan dan kedaulatan yang dipegang rakyat akan lebih vokal terdengar. Hal ini terlihat sangat menguntungkan dalam hubungan antara penghuni kursi pemerintahan dan rakyat mengingat arus globalisasi dan teknologi sudah mengaburkan dimensi jarak dan waktu. Perubahan seperti itu tentunya merupakan hal yang menguntungkan karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan demokrasi di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada media pasti akan diikuti dengan perubahan pada masyarakat.² Kedua, munculnya kemudahan akses informasi dalam rangka meningkatkan demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat rawan ditunggangi oleh sebuah hegemoni yang memiliki kepentingan khusus entah perseorangan maupun kelompok. Yang perlu diwaspadai adalah apakah nantinya hal tersebut akan berdampak baik atau buruk bagi perkembangan kedaulatan rakyat.

Banyak asumsi yang muncul bahwa masyarakatlah yang mempengaruhi perkembangan media massa. Konten yang dibawakan oleh media massa pada saat tertentu sesuai dengan apa yang menjadi selera, minat khalayak, dan aspirasi pasar. Bercermin dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat banyak dibantu oleh media massa.

¹Hafied Cangara 'Pengantar ilmu komunikasi', 123(2010).

² Joseph Straubhaar and others, '*Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology*', 2008, P13-15

Sayangnya, dalam berbagai kesempatan jarang terdapat pihak-pihak yang menyuarakan suara dan kepentingan rakyat. Kurang adanya pihak yang merasa keberatan dengan situasi media massa melalui kehadiran konten-konten yang tidak memberikan edukasi signifikan menjadi salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi negara berkembang yang rapuh seperti Indonesia. Pasalnya, kehadiran media massa akan sangat berdampak terhadap pembangunan kedaulatan rakyat yang kuat. Sekali saja rakyat tergiring akan opini yang disampaikan sebuah media massa, dikhawatirkan akan memancing lebih banyak oknum yang memanfaatkan hal ini.

Dalam pemerintahan demokratis Indonesia, kedaulatan rakyat merupakan suatu kuasa yang amat penting dalam menyalurkan aspirasi bersama untuk masa depan negara. Keberadaan wakil rakyat di kursi pemerintahan nyatanya tidak cukup untuk memfasilitasi kuasa tersebut. Kuasa atas kebebasan publik dalam berpartisipasi secara tidak langsung di pemerintahan saat ini bersimbiosis kuat dengan media komunikasi massa. Karena hal tersebut kebebasan pers sangat diperlukan. Media massa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengolah, menyampaikan, dan mendapat informasi. Namun, hal tersebut rupanya belum bisa menjamin perubahan ranah publik. Ketentuan lain pun harus dijaga agar masyarakat tetap mendapatkan haknya. Sayangnya, jaminan konstitusional sebagai pelindung hukum untuk kebebasan pers juga tidak dapat begitu diandalkan. Terjadi demikian karena pengaruh aktor politik dan kebudayaan sangat kental yang menyebabkan pergerakan media menjadi tergantung pada kebutuhan kelompok kepentingan tertentu.³ Akibatnya, media menjadi rentan digunakan dalam konteks negatif; sebagai alat manipulasi pemikiran, penggiring opini publik, dan atau kampanye hitam demi kelancaran regulasi aktor politik misalnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berkenaan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana media massa membawa pengaruh terhadap kedaulatan rakyat dalam perkembangan dunia masa kini. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Proses meneliti ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur bersamaan dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menyelidiki sebuah kejadian atau masalah yang terjadi terkait judul.⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian dianalisis dan diolah untuk kemudian mendapatkan solusi. Selain itu pendekatan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk memahami secara integratif dan komprehensif terkait individu yang melakukan aktivitas terkait dengan judul.⁵ Sedangkan studi literatur digunakan dengan cara meneliti dari buku, dan literatur-literatur lainnya sebagai sumber data agar dapat menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif, objektif, dan sistematis tentang bahasan

³ Bohman, James and William Rehg, ' "Jürgen Habermas", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*' (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/habermas/>>.

⁴ Humas Lembaga Penelitian Mahasiswa, 'Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus', Laman Resmi Lembaga Penelitian Mahasiswa, Universitas Negeri Makassar. <<https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>>

⁵ *Ibid.*

yang diangkat judul. Selain itu, pendekatan secara statuta juga diaplikasikan sebagai pendukung untuk memperkuat hasil diskusi.

RESULTS & DISCUSSION

UU Pers dan Independensi Media Massa

Media massa atau dapat disebut dengan pers dalam praktiknya telah diatur pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. UU ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dan menjadi faktor penting dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." sehingga kebebasan pers harus dijamin oleh negara.

Sejatinya peran media massa dalam konstruksi realitas sosial tidak bisa dipisahkan. Secara sederhana media massa sebagai komunikator mengarahkan gagasan dan pesan pada audiens. Dalam kalangan masyarakat tertentu, seperti tokoh masyarakat atau tokoh lainnya media massa merupakan infrastruktur kekuasaan. Dapat dikatakan peraturan misalnya peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan politik, media massa kerap kali disebut sebagai pilar keempat selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁶ Sebuah pendapat mengatakan bahwa terdapat lima peran ideal media dalam mewujudkan kehidupan demokratis. Peran pertama media adalah memberikan informasi tentang apa yang terjadi, peran kedua adalah memberikan edukasi bagi masyarakat tentang hal yang terjadi di lapangan. Namun pada kenyataan saat ini banyak oknum politik yang memanfaatkan media massa sebagai sarana kepentingan politik. Media massa berpengaruh terhadap kampanye politik (media cetak maupun elektronik) karena dalam menentukan keputusan politik, masyarakat akan selalu membutuhkan referensi. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat.

Media massa menentukan agenda publik dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat. Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan media. Dengan demikian, media akan menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi dan semakin efektif jika orang-orang yang memiliki kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu.

⁶ McNair, Briani. ' *An Introduction To Political Communication* ', 2003, P. XV

Dalam kajian hukum dan media massa, moral, dan etika tersebut dapat dihubungkan pada kewajiban para jurnalistik diantaranya adalah melaksanakan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, patuh terhadap institusi dan peraturan hukum dalam melaksanakan etiket baik sesuai ketentuan dalam hukum dimana prinsip dan aturan yang ada merupakan suatu hal yang telah diterima dan diterapkan di masyarakat. Sejalan dengan hal itu, sebenarnya profesi jurnalistik dengan prinsip etikanya memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pemberitaan di media massa secara tertib dalam hubungan antar subjek hukum.

Sedangkan dalam kajian demokratisasi, press independent membuka peluang bagi terbukanya kebebasan, perubahan politik, dan mendukung transisi demokrasi serta meruntuhkan rezim yang otoritarian. Media juga dapat bertindak sebagai agen perubahan. Neumann menjelaskan bahwa kebebasan memegang peranan penting di Asia Tenggara, khususnya dalam proses liberalisasi politik yang berhubungan dengan munculnya pers yang lebih terbuka dan kritis.

Manipulasi Politik Melalui Media Massa Oleh Elit Politik

Mengenai perkembangan media di Indonesia, faktor kepemilikan saham di institusi media dan faktor ekonomi serta pemasaran media akan sangat menentukan bagaimana media tersebut berpedoman pada suatu ideologi, dalam hal ini ideologi tersebut mengarah pada pendekatan ekonomi politik media yang kurang sejalan dengan etika berkomunikasi. Akibatnya, etika komunikasi yang ada hanya menjadi instrumen belaka dan tiada artinya dalam menentukan substansi media massa dan kualitas informasi berita yang dibawakan. Padahal, publik dalam kaitannya dengan komunikasi politik khususnya di Indonesia dalam keterikatan dengan suatu ideologi dengan partai politik juga bersinggungan dengan dasar agama, nasionalisme, ataupun kerakyatan.

Media menjadi peracik agenda politik yang memberikan informasi dan memilah isu yang pada akhirnya akan mempengaruhi opini publik. Peran media yang lain adalah sebagai pemantau pemerintah. Maksudnya adalah media juga memiliki peran untuk mengkritik pemerintah, baik itu kebijakan ataupun program-program yang dibuat oleh pemerintah. Dalam bukunya, McNair juga menyebutkan bahwa media berperan untuk mengadvokasi beberapa pandangan politik yaitu sebagai kanal partai politik untuk menyampaikan sudut pandangannya. Secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat yaitu sebagai pemberi informasi, sebagai pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman makna informasi, pembentukan kesepakatan, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan, transmisi warisan budaya, dan ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat. Terkait kepentingan yang terjadi media massa secara tidak langsung dapat disisipi segala macam propaganda atau kampanye yang terjadi. awal yang cukup bagus.

Saat ini sering terjadi benturan antara berbagai fenomena keseragaman pemberitaan di media massa sebagai akibat dari benturan kepentingan, ekonomi dan pemasaran institusi, lebih jauh lagi benturan kepentingan politik juga berpengaruh didalamnya. Karakteristik peristiwa politik selalu menarik perhatian masyarakat untuk mencermati bagaimana perkembangan politik di negeri ini dan media massa yang tidak dapat dipisahkan dengan

peristiwa politik masa kini. Politik yang sedang berada di era mediasi yaitu media massa dimana para aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian para jurnalis agar aktivitas politiknya diliput oleh media. Bahkan peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik biasanya memiliki nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka, sebagai contoh adalah agenda rapat partai atau pertemuan antara seorang tokoh politik dengan para pendukungnya. Terlebih apabila peristiwa politik itu menyangkut peristiwa yang melibatkan seluruh warga negara seperti pergantian presiden atau pembubaran parlemen. Tidak dapat dipungkiri bahwa masa kini liputan politik selalu ada di media massa setiap harinya.

Berita ataupun liputan politik cenderung lebih kompleks apabila dibandingkan dengan topik permasalahan lainnya. Liputan politik mempunyai dimensi pembentukan opini publik (*public opinion*) baik yang diharapkan oleh para politisi maupun oleh para jurnalis. Bagi para aktor politik, berita politik diharapkan dapat memberikan pengaruh pada sikap khalayak mengenai masalah yang dibicarakan olehnya. Para aktor politik ingin publik ikut terlibat dalam pembicaraan dan tindakan politik melalui pesan politik yang disampaikannya. Sejatinya dalam komunikasi politik, dimensi ini merupakan tujuan utama karena akan berpengaruh pada pencapaian-pencapaian politik para aktor politik.

Kerangka pembentukan opini publik didalamnya mengandung tiga aspek sekaligus. Pertama, media massa akan menggunakan simbol-simbol politik, Kemudian kedua, media massa akan melakukan strategi pengemasan pesan (*framing strategis*). Terakhir adalah melakukan fungsi agenda media. Ketika melakukan ketiganya, media massa sangat mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan suatu kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti permintaan pasar dari pembaca ataupun pemirsa, sistem politik yang berlaku, serta berbagai kekuatan luar lainnya. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari suatu peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda tergantung pada cara media melakukan ketiga tindakan tersebut. Kejadian ini berpotensi untuk memecah belah kedaulatan rakyat. Karena dengan adanya metode-metode pengemasan berita seperti yang telah disebutkan diatas manipulasi politik rawan sekali terjadi. Selain itu hal tersebut sangat rawan dimanfaatkan sebagai momentum dari membelokkan kedaulatan rakyat agar sesuai dengan keinginan elit politik.

Dampak Manipulasi Politik Melalui Media Massa Terhadap Kedaulatan Rakyat

Media massa atau mereka yang bekerja di dalamnya harus dipandang sebagai aktor penting dalam politik. Mereka tidak hanya menyampaikan pesan-pesan politik organisasi kepada publik, tetapi mereka mengubahnya melalui berbagai proses pembuatan berita dan interpretasi. Apa yang dikatakan oleh elit politik terkadang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh media massa. Hal ini tentu ada campur tangan baik dari sisi komersial media massa atau malah pelobi dari kalangan-kalangan tertentu demi kelancaran satu dan lain hal. Dalam hal ini termasuk di dalamnya teknik propaganda.

Propaganda media adalah seperangkat teknik manipulasi dimana partisan menciptakan gambar atau argumen yang mendukung ideologi mereka. Teknik-teknik ini umumnya dikaitkan dengan kesalahan logika, manipulasi psikologis, penipuan langsung atau tidak langsung, teknik retorika dan propaganda, dan sering melibatkan eksploitasi informasi

atau sudut pandang pribadi, dengan mendorong orang atau kelompok lain untuk fokus pada satu hal dengan mengalihkan perhatian ke sesuatu yang lain. Ruang media memiliki banyak sarana untuk menyebarkan propaganda, seperti blog, media berita, dan jejaring sosial Facebook, Twitter, atau WhatsApp. Manipulasi media menciptakan propaganda untuk mengalihkan pikiran, dengan asumsi bahwa publik rentan terhadap pengaruh.

Kegiatannya menciptakan doktrin dengan penekanan implisit dan eksplisit, terutama untuk atau melawan satu sisi kasus saat ini. Tentara siber dikerahkan secara besar-besaran dan terorganisir, bergerak untuk mempengaruhi publik dan mengubah pandangan ke arah yang telah disediakan. Teknik ini merupakan salah satu yang marak digunakan di Indonesia. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kebebasan berpendapat yang bisa diraih oleh masyarakat Indonesia. Karena meskipun terlihat seperti rakyat sedang menyuarakan pendapatnya, namun pada nyatanya hal itu merupakan suatu kejadian yang sudah direncanakan kemana arahnya oleh para elit politik atau orang-orang yang memiliki kuasa. Dengan begitu, kedaulatan rakyat dalam hal ini merupakan omong kosong belaka.

Seperti isu perpanjangan masa jabatan kepresidenan tahun 2019-2022, hal ini merupakan ancaman demokrasi yang serius. Dikatakan demikian karena apabila jajaran elit politik dan kepresidenan berhasil melobi opini publik, sehingga kedaulatan rakyat berjalan sesuai rencana mereka maka akan terjadi penyelewengan perundang-undangan yang diikuti dengan perubahan secara besar-besaran dalam tatanan kenegaraan. Mengingat aturan tentang masa jabatan presiden telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.⁷

CONCLUSION

Media massa merupakan salah satu media yang paling efektif dalam mengeksekusi kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya tentunya diikuti dengan kelebihan serta risiko yang besar pula. Dalam topik kedaulatan rakyat, selain mengandung persuasi dalam menyuarakan demokrasi media massa juga kerap kali mengandung berbagai macam manipulasi politik dalam menggiring opini publik. Meskipun telah diakui independensinya masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan akan bahaya tersebut. Karena meski memiliki banyak manfaat ternyata media massa juga memiliki banyak risiko dalam praktiknya pada lingkup kedaulatan rakyat. Propaganda, kronologi yang sudah diarahkan, dan manipulasi politik lainnya. Literasi dan Edukasi yang tinggi sangat diperlukan pada masa globalisasi media seperti saat ini agar urgensi kedaulatan rakyat dapat tetap terlaksana tanpa termakan manipulasi spesifik.

⁷ Pasal 7, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

REFERENCES

- Bafadhal, O. M., “Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa”, *Kaghas: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya*, Vol. 2, No. 2, 2020, 1-9.
- Bohman, James and William Rehg, "Jürgen Habermas", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/habermas/>>.
- Cangara, Hafied, 2010, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Choliq, A. D., “*Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa*”. *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2022, 395-411.
- Hamad, I., 2004, *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*, Yayasan Obor Indonesia.
- Humas Lembaga Penelitian Mahasiswa, “*Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus*”, Laman Resmi Lembaga Penelitian Mahasiswa. Universitas Negeri Makassar. <<https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>>
- Joseph Straubhaar and others, “*Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology*”, 2008, P13-15.
- McNair, Briani. “*An Introduction To Political Communication*”, 2003, P. XV.